

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Agency Theory*

Mardiasmo (2004) menjelaskan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak yang diberikan amanah (*agent*) untuk melaporkan, menyajikan, mempertanggungjawabkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggungjawab yang sudah diberikan pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua, yaitu : 1) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dan 2) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas lebih tinggi.

Berkaitan dengan penelitian ini, praktek pelaporan keuangan merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah sebagai agen berkewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik sosial, politik maupun ekonomi serta baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pengguna informasi keuangan dan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Fatristina, 2011).

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010), akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga - lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya antara lain pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun dana proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Pada prinsipnya akuntansi sektor publik mempunyai kerangka konseptual yang mendasari dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi sektor publik itu sendiri. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep penyusunan dan penyajian laporan keuangan organisasi sektor publik. Tujuannya adalah sebagai acuan untuk:

1. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik.
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik.
3. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi.
4. Penyusunan standar akuntansi sektor publik dalam melaksanakan tugas perumusan standar.

2.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan ialah bentuk tanggung jawab atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan merupakan suatu

hal yang identik dengan ilmu akuntansi, didalamnya tersedia angka – angka yang telah tersusun berdasarkan kegiatan transaksi dan juga tercantum dengan keterangannya. Sehingga suatu laporan keuangan dapat memuat informasi yang krusial bagi pemakai informasi tersebut, yaitu pihak – pihak yang berkepentingan. Tujuan dibuatnya laporan keuangan secara umum merupakan sebagai wadah penyajian informasi tentang posisi keuangan, hasil operasi, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna (*user*) baik dalam pembuatan maupun pengevaluasian keputusan ekonomi atas alokasi sumber daya.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi suatu instansi pemerintahan. Apabila suatu instansi pemerintahan dapat memperkerjakan sumber daya manusia dengan baik maka laporan keuangan yang dibuat akan semakin berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari sumber daya manusia sangatlah krusial dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Berkualitasnya laporan keuangan dapat dilihat apabila telah memenuhi empat karakteristik kualitatif berdasarkan PP No. 71 Th. 2010 diantaranya sebagai berikut:

1. Relevan (*Relevance*)

Jika informasi yang berada di dalam sebuah laporan keuangan dapat menjadikannya sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan pengguna (*user*) dan juga membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu (*past*) atau masa kini (*present*), dan memprediksi masa depan (*future*), selain itu juga dapat menegaskan atau mengoreksi evaluasi yang

dihasilkan pada masa lalu (*past*) maka dapat disebut relevan. Sehingga, antara informasi laporan keuangan yang relevan dan maksud penggunaannya dapat terhubung. Berdasarkan penjelasan singkat diatas, maka informasi yang relevan adalah sebagai berikut:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Feedback value yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu apabila suatu informasi dapat menegaskan (*clarifying*) atau mengoreksi (*correcting*) ekspektasi mereka di masa lalu (*past*) bagi pengguna (*user*).

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Predictive value yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu apabila suatu informasi bisa membantu dalam memprediksi masa yang akan datang (*predicting the future*) yang diambil dari hasil masa lalu (*past*) dan kejadian masa kini (*present*) bagi pengguna (*user*).

c. Tepat waktu

Penyajian informasi dilakukan secara tepat waktu (*on time*) sehingga memberi efek dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Penyajian lengkap yang diberikan dalam hal informasi akuntansi keuangan pemerintah, kelengkapan ini terdiri dari semua informasi akuntansi yang memberi efek pada saat pengambilan keputusan tidak

terlepas dari memperhatikan kendala yang ada. Latar belakang informasi pada masing-masing informasi utama yang ada dalam laporan keuangan dengan pengungkapan yang jelas agar tidak terjadi atau bisa mencegah kekeliruan penggunaan informasi tersebut.

2. Andal (*Reliability*)

Andal apabila suatu laporan keuangan menyajikan informasi yang pengertiannya bebas dari ambiguitas atau makna ganda yang menyebabkan penyalah artian dan kesalahan material, setiap fakta yang disajikan secara jujur, serta *verifiability*. Meskipun informasi yang disajikan sudah relevan, namun apabila tidak dapat diandalkan pada suatu hakikat atau penyajiannya maka dalam penggunaan informasi tersebut berpotensi tinggi yaitu dapat menyesatkan. Suatu informasi yang andal terdiri atas karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian Jujur

Informasi memperlihatkan kejujuran atas segala transaksi/kegiatan serta peristiwa lainnya yang memang pada hakikatnya atau secara wajar dalam penyajiannya dapat diharapkan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Verifiability yaitu apabila penyajian informasi pada suatu laporan keuangan bisa diuji, serta apabila telah teruji lebih dari sekali dan dilakukan dari pihak yang berbeda, dan pada hasilnya tetap memberikan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

c. Netralitas

Tujuan atau arahnya suatu informasi berdasarkan pada kebutuhan umum, bukan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan (*Comparability*)

Jika suatu informasi dari sebuah laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan *pre-period* atau laporan keuangan yang pada umumnya dibuat oleh entitas pelaporan lain maka, laporan keuangan tersebut akan lebih berguna atau bermanfaat. Perbandingan dapat dilakukan dengan dua cara baik internal maupun eksternal. Kedua cara perbandingan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi yang diterapkan pada suatu entitas. Jika suatu entitas membuat penerapan berupa kebijakan akuntansi tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, maka menggunakan perbandingan secara internal. Sedangkan, jika entitas lainnya yang hendak membandingkan penerapan kebijakan akuntansi yang sama maka menggunakan perbandingan secara eksternal. Apabila kebijakan akuntansi yang diterapkan suatu entitas pemerintah lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sedang diterapkan sekarang, maka dilakukanlah pengungkapan atas perubahan tersebut pada saat periode perubahan berlangsung.

4. Dapat dipahami (*Understandability*)

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tiga dari empat karakteristik kualitatif yang menunjukkan bahwa suatu laporan keuangan yang

berkualitas, selanjutnya yang terakhir yaitu dapat dipahami. Penyajian informasi pada laporan keuangan dapat dipahami bagi para pengguna (*user*) dan juga bentuk serta istilahnya dinyatakan sesuai dengan batasan para pengguna (*user*) atas pemahamannya. Maka dari itu, pengguna dianggap sudah mempunyai pengetahuan yang memadai atas aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelaporan, selain itu pengguna (*user*) juga memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang ditujukan.

2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Di dalam pengelolaan keuangan daerah, OPD harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. di dukung dengan adanya latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan tentunya. Sehingga dalam penerapan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut nantinya dirasa mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah biasanya dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan adanya ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Ihsanti, 2014).

Menurut Sari (2014), Kapasitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

“Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan kepemilikannya akan pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang cukup memadai.”

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi itu sendiri. Sumber daya manusia ialah salah satu elemen organisasi yang dirasa penting, maka dari itu harus dipastikan jika pengelolaan sumber daya manusia telah dilakukan sebaik mungkin supaya mampu memberikam kontribusi yang optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, pengertian kompetensi adalah sebagai berikut:

“Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.”

Senada dengan pendapat Kamariah (2012) bahwa kapasitas sumber daya manusia dapat diukur melalui pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Ketiga hal tersebut yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh setiap orang untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka peneliti menggunakan tiga indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia antara lain:

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Seorang pegawai yang memiliki kemampuan pengetahuan yang baik maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan.

2. Keterampilan

Keterampilan merupakan suatu ilmu yang secara lahiriah ada di diri manusia, sehingga perlu dipelajari lebih mendalam untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Keterampilan dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas.

3. Perilaku

Perilaku merupakan tindakan atau aktivitas dari seseorang dalam melaksanakan tugas, seperti misalnya dalam bidang akuntansi seseorang bekerja dengan mengedepankan kode etik sebagai seorang akuntan.

2.5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 bahwa, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sebagai berikut :

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ialah suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok (Nordiawan, 2008) yaitu:

1. Pertanggung jawaban
2. Manajerial
3. Pengawasan

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan guna untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan dari pengelola keuangan pemerintah dengan melakukan penyusunan serta pengembangan SAP (Halim, 2008). Di Dalam Akuntansi Pemerintah daerah sendiri, sistem akuntansi yang digunakan adalah desentralisasi, desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional hingga ke tingkat daerah (Bastian, 2006).

Tujuan dari SAKD terdiri dari beberapa hal, salah satu diantaranya yaitu menyediakan informasi keuangan secara cermat, lengkap dan akurat sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat menyajikan suatu laporan keuangan dengan pertanggung jawaban yang jelas, handal dan dapat digunakan oleh pihak - pihak eksternal. Pihak tersebut merupakan pihak eksternal pada pemda yang memerlukan baik secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) merupakan pengertian dari stakeholders yang meliputi:

1. Badan Pengawas Keuangan (BPK)
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3. Investor, donator dan kreditor
4. Pemerintah Pusat
5. Rakyat
6. Analisis ekonomi dan pemerhati pemda; dan
7. Pemda lain (provinsi, kabupaten dan kota)

2.5.1. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi:

1. Pencatatan

Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

2. Penggolongan dan pengikhtisaran

Adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya.

3. Pelaporan

Setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan Donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat diukur dengan indikator :

1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah.
2. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
3. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik

2.6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Wilkinson (2000) Teknologi informasi didefinisikan sebagai

“teknologi untuk mengolah data, memproses, menyusun, menyimpan, mendapatkan, memanipulasi data dalam beberapa cara dengan tujuan untuk mendapatkan hasil informasi berkualitas, informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.”

Kemudian digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, hingga pemerintahan serta hasil tersebut merupakan informasi yang strategis untuk dijadikan sebagai salah satu cara pengambilan keputusan. Yang kemudian Teknologi informasi sendiri untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi. Meliputi komputer, perangkat lunak, database, jaringan, *electronic commerce*, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan teknologi.

Peraturan Pemerintah No 56 pada Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 pada Tahun 2010 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah yaitu untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dalam pemerintah sendiri perlu adanya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan system informasi manajemen (Nurillah, 2014).

Menurut Jurnal dan Supomo (2002), pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan indikator:

1. Perangkat, merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan.
2. Pengelolaan Data Keuangan, merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh.
3. Perawatan, merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.

2.7. Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mahmudi (2016) Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah sebagai berikut:

“SPI merupakan sebuah proses pengendalian yang berkaitan erat baik pada tindakan maupun kegiatan pimpinan (atasan) organisasi beserta seluruh pegawai yang dilakukan secara kontinu (terus menerus) bukan hanya pada keadaan tertentu saja.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan lingkungan pemerintah daerah.

Keberadaan PP No. 60 Tahun 2008 tersebut, merupakan perwujudan dari amanat Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

1. Pada pasal 55 ayat (4) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Pada pasal 58 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari dua pengertian di atas, Sistem Pengendalian Intern dapat diartikan sebagai kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mengontrol jalannya seluruh kegiatan

baik atasan maupun bawahan agar tercapainya tujuan dan sasaran organisasi khususnya pada lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah juga disebutkan bahwa terdapat lima unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi harus menciptakan lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif agar sistem pengendalian internal dapat diterapkan melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan, yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko dengan cara menetapkan tujuan instansi.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi risiko dan penetapan pelaksanaan kebijakan. Kegiatan pengendalian ini dapat berupa pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, serta akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan segala bentuk informasi kepada seluruh pegawai. Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan minimal harus memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, serta memperbaiki sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal wajib dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta review lainnya.

2.7.1. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3. Pengamanan aset negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara

menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat.

Keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi SDM merupakan kemampuan atau kapabilitas dan kapasitas yang terbentuk dari sinkronisasi atas pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan perilaku (*attitude*) yang dimiliki seseorang (*individu*) dalam suatu organisasi atau suatu sistem guna melaksanakan kewajiban atau fungsi-fungsi atas tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Sehingga, SDM yang berkompeten sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berkualitasnya laporan keuangan dapat disajikan melalui informasi yang terkandung didalamnya berupa karakteristik yang perlu dipenuhi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ada empat karakteristik. Empat karakteristik tersebut adalah relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*) dan dapat dipahami (*understandability*). Hal tersebut menunjukkan bahwa sejalan dengan semakin berkompeten SDM yang dimiliki maka laporan keuangan juga semakin berkualitas.

2.8.2. Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

“sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan ,penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan

keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.”

melihat dari salah satu tujuan dibuatnya sistem akuntansi keuangan daerah yaitu menyediakan informasi keuangan secara cermat, lengkap dan akurat sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, handal dan dapat digunakan oleh pihak - pihak eksternal. Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah harus berdasar pada kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga dapat memberi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.3. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 56 pada Tahun 2005 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah yaitu untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dalam pemerintah sendiri perlu adanya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen. Serta pemanfaatan teknologi informasi sendiri dapat meminimalisasi adanya kesalahan-kesalahan dalam pengolahan data, dikarenakan aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara sistematis dan pada akhirnya mampu menyajikan laporan keuangan yang handal.

2.8.4. Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016) pengertian SPI adalah sebagai berikut:

“SPI merupakan sebuah proses pengendalian yang berkaitan erat baik pada tindakan maupun kegiatan pimpinan (atasan) organisasi beserta seluruh pegawai yang dilakukan secara terus menerus bukan hanya pada keadaan tertentu saja.”

Tujuan dari sistem pengendalian intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 yaitu membuat kegiatan menjadi efektif, efisien, serta dapat menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejalan dengan semakin kuat SPI yang dimiliki maka laporan keuangan juga semakin berkualitas.

2.9. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian pertama dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Triyanti (2018) yang berjudul, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nugraheta (2017) yang berjudul ” Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dengan objek skpd Kota Surakarta menunjukkan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan dikarenakan sebagian besar pegawai bagian keuangan di SKPD Kota Surakarta tidak memiliki latar belakang akuntansi membuat penyusunan laporan keuangan menjadi tidak efektif dan efisien. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Mokoginta, dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah namun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Rini (2017) yang berjudul, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya, dinyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Ramadhani (2018) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi staf terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun Pemanfaatan Teknologi

Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi staf tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Alamsyah, dkk (2018) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pengujian penelitian terdahulu mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1	Nurillah dan Muid (2014)	Variabel Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan	SKPD di Kota Depok	1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan

		<p>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi(X3), Sistem Pengendalian Intern (X4)</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>		<p>terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas</p>
--	--	--	--	---

				<p>laporan keuangan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
2	Triyanti (2018)	<p>Variabel Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2)</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	SKPD di Kabupaten Magelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

				pemerintah daerah
3	Nugraheta (2017)	<p>Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), Penerepan Standar Akuntansi Pemerintah (X3)</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	SKPD di Kota Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sitem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

4	Mokoginta, dkk (2017)	<p>Variabel Independen: Sistem Pengendalian Intern (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengendalian Intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5	Rini (2017)	<p>Variabel Independen: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), Sistem Pengendalian Intern (X3), Pemanfaatan</p>	SKPD Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem akuntan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

		<p>Teknologi Informasi (X4),</p> <p>Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>		<p>2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p>
6	Ramadhani (2018)	Variabel Independen : Kompetensi	OPD di Provinsi Banten	1. Kompetensi sumber daya manusia

		<p>Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi(X3), Sistem Pengendalian Intern (X4), Kompetensi Staf (X5)</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>		<p>berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
--	--	--	--	--

				5. Kompetensi staf tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7	Alamsyah, dkk (2018)	<p>Variabel Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi(X3), Sistem Pengendalian Intern (X4).</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	SKPD Kota Depok	<p>1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif</p>

				<p>signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
--	--	--	--	--

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Proses dari sebuah pembelajaran akan menghasilkan kompetensi, dengan adanya pembelajaran maka akan ada kemungkinan-kemungkinan dari tiap individu

untuk memperoleh keterampilan, sikap, dan perilaku. Untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan kompetensi yang memadai. Kompetensi yang dimiliki pegawai atau pejabat keuangan dapat mempengaruhi tingkat keuangan laporan keuangan yang dihasilkan. (Ismail, 2015)

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014), Triyanti (2018), Rini (2017), Ramadhani (2018), dan Alamsyah, dkk (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Nugraheta (2017) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa:

H_{a1} = kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.10.2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sebagai berikut :

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ialah suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Melihat dari salah satu tujuan dibuatnya SAKD yaitu menyediakan informasi keuangan secara cermat, lengkap dan akurat sehingga dengan adanya tujuan

tersebut dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, handal dan dapat digunakan oleh pihak - pihak eksternal. Implementasi SAKD harus berdasar pada kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga dapat memberi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014), Mokoginta, dkk (2017), Rini (2017), Ramadhani (2018), dan Alamsyah, dkk (2018), menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa:

H_{a2} = sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.10.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No 56 pada Tahun 2005 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah yaitu untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Dalam pemerintah sendiri perlu adanya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen. Serta pemanfaatan teknologi informasi sendiri dapat meminimalisasi

adanya kesalahan-kesalahan dalam pengolahan data, dikarenakan aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara sistematis dan pada akhirnya mampu menyajikan laporan keuangan yang handal.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014), Rini (2017), dan Alamsyah, dkk (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhani (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa:

H_{a3} = pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.10.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016) bahwa pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah sebagai berikut

“SPI merupakan sebuah proses pengendalian yang berkaitan erat baik pada tindakan maupun kegiatan pimpinan (atasan) organisasi beserta seluruh pegawai yang dilakukan secara kontinu (terus menerus) bukan hanya pada keadaan tertentu saja.”

dapat dilihat dari salah satu tujuan dibuatnya (SPIP) yaitu untuk menghasilkan informasi keuangan (*financial information*) yang relevan (*relevance*), akurat (*accurate*) dan andal (*reliability*). Hal tersebut menunjukkan

bahwa sejalan dengan semakin kuat SPIP yang dimiliki maka laporan keuangan juga semakin berkualitas.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014), Nugraheta (2017), Triyanti (2018), Rini(2017), dan Alamsyah, dkk (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta, dkk (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Lalu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhani (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa:

H_{a4} = sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah